

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah penulis uraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perluasan Basis Penerimaan

Pada identifikasi dan menjangar wajib retribusi tidak ditemukan wajib retribusi pasar baru, tetapi ditemukan obyek retribusi baru namun tidak dilakukan upaya lebih lanjut guna menjadikan obyek tersebut sebagai salah satu obyek retribusi pelayanan pasar yang Dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan bidang Pasar Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan dalam hal evaluasi tarif, sudah dilakukan rutin setiap bulannya yang mana berkaitan pada fokus pencapaian dan peningkatan target. Adanya upaya yang dilakukan dalam peningkatan basis data obyek dengan cara turun langsung ke unit-unit dan pedagang yang ada di pasar daerah. Selain itu adanya penyesuaian media pemungutan yang sekarang disama ratakan menggunakan karcis bernilai dua ribu rupiah

2. Pengendalian atas Kebocoran Pendapatan

Upaya dalam mengendalikan kebocoran pendapatan yaitu dengan melakukan audit secara rutin maupun insidental dan reguler, memperbaiki sistem akuntansi penerimaan daerah, memberikan sanksi atau penghargaan kepada masyarakat, meningkatkan disiplin dan moralitas pegawai. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo bidang pasar melakukan audit secara internal di setiap bulannya dan berfokus pada target pencapaian pendapatan, sedangkan audit secara eksternal dilakukan rutin setiap akhir tahun oleh pihak Inspektorat

Daerah. Selain itu, tidak ada upaya perbaikan sistem akuntansi penerimaan daerah karena sistem akuntansi yang ada sudah sangat baik dan tidak ada masalah. Di samping itu, tidak ada pemberian penghargaan maupun sanksi tegas kepada para wajib retribusi. Upaya untuk meningkatkan kedisiplinan dan moralitas kepada para pegawai dilakukan dengan cara memberikan pengarahan dan pengembangan pada pegawai berupa sosialisasi dan beberapa kegiatan pertemuan Korwil Pasar Rakyat Kabupaten Sidoarjo

3. Peningkatan Efisiensi Administrasi

Dalam meningkatkan efisiensi administrasi, prosedur administrasi pemungutan retribusi pasar di unit-unit hingga sampai ke Kas Daerah sudah dilaksanakan dengan mudah, sederhana, dan tidak berbelit-belit. Selain itu, tidak ada pengurangan biaya pemungutan dan tidak ada kerjasama dengan pihak lain karena pemungutan dilakukan langsung oleh juru pungut.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Upaya terakhir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu dengan adanya transparansi dan akuntabilitas. Untuk dukungan TI (Teknologi Informasi) Dinas Pasar sudah melaksanakannya dengan adanya website, namun website Dinas Perindustrian dan Perdagangan masih kurang sempurna terkait penyediaan informasi dan juga adanya website Pasar Rakyat Kabupaten Sidoarjo sudah bagus namun tidak dikelola dengan baik sehingga informasi yang tersedia tidak Up to Date. Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Sidoarjo juga sudah memiliki Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan memiliki keahlian yang memadai dalam penggunaan teknologi, dan pada retribusi

pelayanan pasar Kabupaten Sidoarjo tidak ditemukan adanya indikasi korupsi yang dilakukan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun Unit Pasar di Kabupaten Sidoarjo.

5.2 Saran

Dari kesimpulan di atas penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo harus segera melakukan upaya lebih lanjut untuk mengidentifikasi dan menemukan obyek baru retribusi pelayanan pasar yang dapat dijadikan sebagai pendapatan retribusi daerah secara maksimal.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo harus segera menyusun regulasi atau Perda terbaru mengenai retribusi pelayanan pasar, dengan menetapkan tarif terbaru yang lebih sesuai dengan keadaan di lapangan sehingga membuat pendapatan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Sidoarjo dapat lebih meningkat.
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo harus lebih tegas dalam menjalankan atau memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati, sehingga pendapatan retribusi pasar dapat lebih meningkat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo juga harus memperhatikan informasi mengenai SOP pemungutan retribusi pelayanan pasar di setiap Unit Pasar di Kabupaten Sidoarjo.
4. Perlu adanya perbaikan transparansi pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan retribusi pasar kepada masyarakat luas dengan berbasis sistem online

(website) yang juga langsung terintegrasi dengan website Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sehingga pengawasan pengelolaan retribusi pasar dapat lebih transparan.

5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo harus mempercepat pembangunan atau revitalisasi untuk pasar-pasar daerah di Kabupaten Sidoarjo, sehingga pasar daerah dapat ramai peminat, mampu bersaing dengan pasar lainnya yang dapat membuat pendapatan retribusi pasar meningkat, juga keberadaan adanya pasar desa seharusnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat menjalin kolaborasi atau kerjasama baik dengan sektor publik maupun dengan sektor privat sekalipun.

